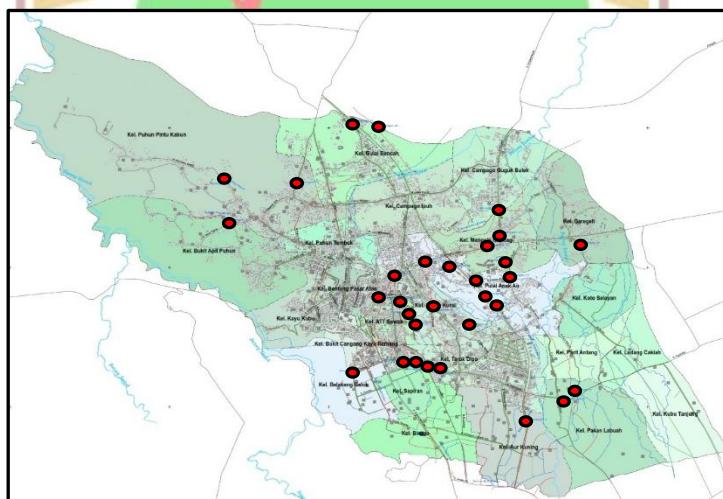


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan tahunan rerata 2800 - 3000 mm pertahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014, Kota Bukittinggi dengan jumlah penduduk sekitar 130.000 jiwa termasuk dalam klasifikasi kota sedang. Periode ulang banjir untuk kota sedang adalah setiap 5–10 tahun, sedangkan kejadian banjir saat ini terjadi di Kota Bukittinggi lebih dari satu kali dalam satu tahun. Banjir di Kota Bukittinggi disebabkan curah hujan tinggi ditambah dengan sistem drainase yang kurang memadai. Sistem drainase yang tidak optimal telah menyebabkan 31 titik rawan banjir dan genangan yang tersebar di berbagai kawasan (Master Plan Drainase, 2021).



Gambar 1.1 Titik Banjir dan Genangan

Sistem drainase primer yang melewati Kota Bukittinggi menerima debit aliran dari saluran irigasi Kabupaten Agam yaitu dari daerah irigasi Cingkariang dan Bandar Durian, sehingga kapasitas debit pada saluran drainase primer yang melewati Kota Bukittinggi lebih besar. Salah satu penyebab banjir ini disebabkan oleh kapasitas air yang masuk ke dalam Kota Bukittinggi pada waktu-waktu tertentu melebihi kapasitas saluran yang ada.

Saluran drainase yang ada saat ini mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai drainase, irigasi serta ada yang berfungsi ganda sebagai drainase dan irigasi. Permasalahan lain sistem drainase Kota Bukittinggi yaitu sedimentasi, tumbuhnya semak dan rumput-rumput liar, di beberapa titik terdapat saluran yang belum mempunyai dinding, penyempitan saluran, serta saluran drainase berada di sisi-sisi rumah dan bawah rumah penduduk.

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melaksanakan pekerjaan peningkatan saluran drainase primer pada tahun 2021. Proyek ini mencakup pembangunan drainase sepanjang 1,0 km dengan pagu anggaran ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana (PT. Inanta Bhakti Utama). Pekerjaan ini mengalami kendala terlambatnya kemajuan pekerjaan yang menyebabkan tidak selesainya pekerjaan pada akhir kontrak tanggal 26 Desember 2021 sehingga dilakukan pemutusan kontrak.

Pemutusan kontrak pada pekerjaan peningkatan saluran drainase primer (SMPN 1 s/d Rumah Potong) penting untuk dievaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mendapatkan gambaran teknis, administratif, dan manajerial yang menyebabkan kontrak berakhir sebelum pekerjaan selesai. Hasil analisis terhadap faktor-faktor penyebab pemutusan kontrak diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem manajemen proyek dan penguatan proses dalam seleksi penyedia jasa. Pemutusan kontrak pada proyek konstruksi publik, termasuk saluran drainase, berdampak pada keterlambatan pelayanan publik, kerugian finansial, dan penurunan kualitas infrastruktur. Evaluasi ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan meningkatkan keberhasilan pekerjaan konstruksi.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab pemutusan kontrak.

- b. Mengevaluasi mekanisme dan prosedur pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditinjau dari regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Memberikan rekomendasi untuk pencegahan kasus serupa di masa mendatang.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi: sebagai acuan untuk perbaikan pengelolaan proyek infrastruktur.
- b. Bagi kontraktor: pengetahuan untuk menghindari risiko pemutusan kontrak.
- c. Bagi akademisi: kontribusi literatur tentang manajemen kontrak konstruksi.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis hanya pada pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN 1 S/D Rumah Potong Hewan) Kota Bukittinggi periode pelaksanaan kontrak Tahun Anggaran 2021.
- b. Data yang digunakan adalah data sekunder (dokumen proyek resmi) dan data primer (hasil wawancara) dari pihak-pihak yang terlibat langsung (pengguna jasa dan konsultan pengawas).

